

Judul : Target penerapan RCEP awal 2022  
Tanggal : Rabu, 06 Oktober 2021  
Surat Kabar : Republik  
Halaman : 10

# Target Penerapan RCEP Awal 2022

Potensi nilai perdagangan melalui RCEP ditaksir 10,64 miliar dolar AS.

## ■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Pemerintah menargetkan penerapan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada 2022. Sosialisasi kepada pelaku usaha terus dilakukan sambil menuntaskan proses ratifikasi.

"Implementasi RCEP diharapkan mulai bisa diterapkan per 1 Januari 2022," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Ari Satria, dalam acara sosialisasi RCEP, di Jakarta, Selasa (5/10).

Menurut dia, seluruh anggota RCEP telah menandatangani kesepakatan pada akhir 2020. Sejumlah sosialisasi dan persiapan sudah dilakukan. Namun, proses ratifikasi baru satu kali dilakukan bersama DPR dan diharapkan bisa dipercepat.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengatakan, dukungan parlemen pada RCEP sangat dibu-

tuhan. "Perjanjian dagang ini memiliki pangsa pasar sangat besar. Kalau bisa, diratifikasi dalam waktu dekat agar segera dirasakan manfaatnya," katanya.

Sejauh ini, Kemendag bersama Komisi VI baru menggelar satu kali rapat kerja pada 25 Agustus 2021 untuk membahas proses ratifikasi RCEP. Pembahasan dilakukan setelah para pemimpin negara menandatangani persetujuan RCEP pada 15 November 2020.

RCEP melalui proses perundingan panjang sejak 2011, yang melibatkan 10 negara ASEAN bersama Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Negara yang telah meratifikasi, di antaranya Singapura, Thailand, Myanmar, Jepang, dan Cina.

Menurut Jerry, potensi nilai perdagangan melalui RCEP ini ditaksir mencapai 10,64 miliar dolar AS atau sekira 27,1 persen dari total nilai perdagangan dunia. Adapun pangsa pasar RCEP menjangkau 2,2 miliar jiwa atau 29,6 persen dari penduduk dunia.

Sementara, nilai produk domestik bruto diperkirakan 24,69 miliar dolar AS, setara 29 persen dari PDB dunia. Arus investasi asing yang bisa diperoleh antarnegara 379,9 miliar dolar AS, sekira 29,3 persen nilai investasi dunia.

"Saya kira, ini bukan angka yang sedikit. Jadi, harus segera diutilisasi dan dikapitalisasi," ujar Jerry. Indonesia mendapatkan keuntungan bisa mengeksport sekitar 10 ribu produk menggunakan fasilitas bebas bea masuk.

Anggota Komisi VI DPR, Tommy Kurniawan, mengatakan, DPR mendukung keinginan agar RCEP segera diratifikasi. Sebab, perjanjian dagang, termasuk RCEP, salah satu langkah strategis meningkatkan perekonomian regional dan global di tengah pandemi.

Komisi VI, dia menjelaskan, akan segera berdiskusi dengan pemerintah agar ratifikasi maksimal bisa akhir tahun ini. Namun, ia pun meminta pemerintah sembari terus menyosialisasikan RCEP sehingga pelaku usaha mengetahui dan bisa memanfaatkannya secara maksimal.

"Kami harap proses ratifikasi segera diselesaikan akhir 2021. Kami dukung sepanjang itu bisa menda-

tangkan manfaat riil bagi orang banyak," kata dia.

## Akses pasar

Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi, menuturkan, dengan RCEP, pengusaha memiliki peluang akses pasar lebih luas. Namun, hal itu harus diiringi peningkatan kualitas produk, strategi *branding*, sistem logistik, hingga sistem pembayaran yang lebih mudah.

Menurut Almer, ini salah satu kunci Indonesia bisa memanfaatkan fasilitas RCEP. "Maka, penting pula bagi Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan guna meningkatkan daya saing ekonomi dan tak kalah penting memastikan masuknya investor," katanya.

Ia menambahkan, perlu juga menerapkan strategi pertahanan di pasar domestik maupun luar negeri terhadap potensi produk saingan dari sesama anggota RCEP.

"Kita juga akan melakukan akurasi pendataan kebutuhan produk di negara anggota RCEP dan mendampingi perusahaan-perusahaan yang hasil produksinya sudah diminati," ujar Almer. Besarnya potensi itu, dia menegaskan, tidak boleh disiasikan. ■ ed; ferry kishandi